

Analisis IRIO Dalam Pengembangan Industri Pada Era Otonomi Daerah

Pratiwi Kartika
Rachma Indah Nurbani
Yus Medina Pakpahan¹

ABSTRAK

Otonomi sudah berlangsung tiga tahun tetapi dampaknya belum terasa. Tulisan ini menganalisa sektor industri mana yang berpotensi untuk dikembangkan di masing-masing daerah, guna mengetahui apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Analisa ini menggunakan output dan income multiplier yang didapat dari data IRIO 1995. Nilai multiplier yang didapat menggambarkan keunggulan sektor-sektor di setiap daerah. Dari hasil terlihat, masih banyak daerah yang belum berkembang ternyata memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pengembangan industri di daerah-daerah penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Pengembangan industri tersebut sebaiknya diarahkan ke sektor unggulan. Pengembangan industri daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi di awal pelaksanaan otonomi daerah peran pemerintah pusat sangat diperlukan.

Kata Kunci: IRIO, Industri, Otonomi Daerah
Spesifikasi JEL: R15, L52

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Selama beberapa dekade sebelum krisis ekonomi tahun 1997 Indonesia merupakan negara berkembang yang cukup gemilang di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang dipacu oleh investasi mengantar Indonesia menuju transformasi ekonomi dari perekonomian agraris menuju perekonomian industri. Hal ini ditandai oleh dibangunnya berbagai industri di Indonesia terutama industri substitusi import.

Akan tetapi, pembangunan industri tersebut sama sekali tidak mencerminkan pemerataan pembangunan. Industri-industri tersebut hanya berkembang di daerah-daerah tradisional di Pulau Jawa. Industri yang berkembang di daerah luar Jawa sebagian besar adalah industri primer yaitu kehutanan, pertambangan, dan lain-lain yang sifatnya mengambil

¹ Pratiwi Kartika, Rachma Indah Nurbani, dan Yus Medina Pakpahan adalah mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia angkatan 2001.

langsung dari alam. Hasil dari hutan dan tambang itu pun tidak bisa dinikmati dengan seharusnya oleh daerah karena pembagian hasil yang tidak jelas oleh pusat, daerah hanya menikmati sebagian kecil dari pendapatan hasil alamnya. Maka tak heran banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi penduduknya miskin, seperti Aceh, Riau, dll.

Ketimpangan tersebut memicu protes dari daerah terutama daerah di luar Jawa. Hal ini semakin memuncak setelah turunnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Daerah menuntut untuk dilakukan otonomi daerah. Salah satu pokok dari pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal yaitu kewenangan untuk mengatur keuangan daerah sendiri (pemasukan dan pengeluaran daerah). Campur tangan pemerintah terhadap keuangan daerah dilakukan melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan (Dana Alokasi Khusus). Dengan adanya otonomi daerah, pembagian hasil antara pusat dan daerah menjadi lebih adil, karena sebagian besar diberikan kepada daerah (dengan prosentase yang sudah ditentukan). Daerah juga diberikan kewenangan yang besar dalam menarik investasi langsung dan juga diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman dengan izin dari pusat. Pembagian hasil antara pusat dan daerah berupa pembagian hasil pendapatan sumber daya alam dan pendapatan pajak.

Pelaksanaan otonomi daerah ini sangat menguntungkan bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam atau daerah yang merupakan pusat perdagangan strategis. Akan tetapi bagi daerah yang miskin dan bukan pusat perdagangan, hal ini justru merugikan karena alokasi dana untuk daerahnya jadi berkurang. Sehingga daerah-daerah yang miskin ini biasanya sangat bergantung kepada bantuan keuangan dari pusat.

Sejak dilaksanakan otonomi daerah, tiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerahnya diantaranya dengan menarik investasi masuk atau dengan pungutan (pajak). Tetapi bisa dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak lebih dari tiga tahun lalu, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan industri di Indonesia. Pengembangan industri membutuhkan dukungan infrastruktur, seperti sarana transportasi (jalan, pelabuhan, *airport*) dan telekomunikasi. Dan juga kebijakan berupa pajak yang rendah. Yang terjadi saat ini adalah, daerah cenderung menaikkan pajak dan kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur. Menaikkan pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pembangunan infrastruktur yang kurang kebanyakan disebabkan oleh kurangnya dana, hal ini biasanya dialami oleh daerah yang miskin *resource* atau bukan merupakan pusat perdagangan karena mereka tidak memiliki modal untuk membangun.

Terhadap perkembangan industri, dampak otonomi daerah berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya dan juga antara satu sektor dengan sektor lainnya didalam satu daerah. Hal ini disebabkan *resource* (sumber daya) yang dimiliki masing-masing daerah berbeda-beda.

Ada banyak manfaat yang bisa didapat jika industri di daerah berkembang dengan bagus, diantaranya memanfaatkan kekayaan/potensi alam daerah yang selama ini belum diolah, dengan adanya industri sumber daya alam tersebut juga bisa diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah; mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat, sekarang ini otonomi daerah justru membuat daerah menjadi "manja" dengan meminta dana alokasi yang besar; secara keseluruhan industri akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Karena anggaran yang dimiliki relatif terbatas, pemerintah harus membuat perencanaan yang tepat agar dana yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu sangat penting diperhatikan daerah dan sektor mana saja yang akan memberikan efek *multiplier* yang besar.

I.2. Perumusan Masalah

Otonomi daerah yang sudah berlangsung selama lebih dari tiga tahun ini ternyata belum bisa memberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan industri terutama di daerah-daerah. Tidak berkembangnya industri di daerah terutama disebabkan oleh belum tersedianya sarana infrastruktur yang memadai untuk pembangunan industri. Kurangnya dana merupakan kendala utama yang dihadapi daerah dalam penyediaan infrastruktur, terutama bagi daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alam.

Ada banyak infrastruktur yang harus dibangun tetapi dana yang ada tidak memadai dan belum tentu infrastruktur yang dibangun tersebut benar-benar bermanfaat. Disini, peran pemerintah sangat diperlukan yaitu dalam bentuk alokasi dana. Karena dana yang dimiliki terbatas, pemerintah harus memprioritaskan industri-industri dan daerah-daerah yang mempunyai efek *multiplier* yang besar.

I.3. Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa sektor-sektor dan daerah-daerah mana saja yang bisa memberikan efek *multiplier* yang besar, serta hal apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah masing-masing.

II. LANDASAN TEORI

II.1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Ini berarti kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat menjadi diturunkan kepada pemerintah daerah. Dalam bidang ekonomi kekuasaan ini berupa kekuasaan alokasi, dimana tiap-tiap daerah otonom tersebut berhak menentukan penempatan dana-dana yang dimilikinya. Namun bukan itu saja tiap daerah otonom juga harus dapat mencari sumber-sumber pendanaan selain pendanaan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang disebut juga dana perimbangan. Desentralisasi ini juga dapat menghasilkan suatu kondisi dimana dimensi teritorial menjadi semakin kecil. Ini diakibatkan semakin banyaknya daerah yang sebelumnya bersatu dengan satu kabupaten tertentu kemudian memisahkan diri kemudian menjadi kabupaten yang baru untuk mendapatkan hak otonomi tersebut. Pada kenyataan yang ada, desentralisasi ini dapat memberikan dampak berupa eksternalitas semakin besar sehingga berkesan penyediaan barang publik yang *under provided*. Sebaliknya, ketika dimensi teritorial semakin besar, itu berarti mengarah kepada sentralisasi yang memberikan keuntungan internalisasi akibat adanya dampak eksternalitas. Sehingga harus ditemukan wilayah daerah optimal dimana eksternalitas paling minimal.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 pasal 1e

II.2. *Spill-Over Effect*

Penyediaan jasa publik oleh suatu pemerintah daerah ditujukan bagi kepentingan daerah pemerintahan itu. Tetapi, pada kenyataannya jasa publik itu dinikmati juga oleh daerah lain. Bagi daerah penyedia jasa publik, hal ini disebut eksternalitas (*spill-over effect*) yang mengakibatkan penyediaan jasa publik yang tidak efisien serta diperlukan koreksi atasnya. Koreksi atas masalah ini dapat berupa kerjasama dua atau lebih daerah dalam penyediaan jasa publik tertentu. Sebagai contoh, dua daerah yang menjadikan sebuah danau sebagai sumber air minum bisa bekerja sama dalam penyediaan jasa publik ini yaitu menjaga mutu air danau secara bersama-sama.³

II.3. *Ricardian Equivalence*

Menurut David Ricardo, anggaran pemerintah yang defisit (adanya hutang pemerintah) meng-*induce* masyarakat meningkatkan tabungan oleh karena adanya suatu ekspektasi bahwa pemerintah akan menaikkan pajak di masa depan guna membiayai hutang di masa sekarang ini. Jika pemerintah daerah memperoleh dana melalui pengadaaan hutang seperti obligasi ataupun hutang secara langsung seperti kepada pemerintah pusat, swasta, ataupun pihak asing berarti pemerintah daerah tersebut juga harus memikirkan bagaimana cara untuk membayar pada waktu jatuh tempo nantinya. Bila dana tersebut dialokasikan secara tepat sehingga dapat memberikan pendapatan di masa depan, maka hutang tersebut dapat dibayar tanpa menaikkan persentase pajak. Tapi bila yang terjadi sebaliknya, maka yang dilakukan pemerintah daerah tersebut adalah dengan meningkatkan persentase pajak pada waktu akan membayar, sehingga diperoleh dana untuk membayar kembali hutang tersebut berikut bunganya. Bagi masyarakat yang memperkirakan terjadinya kondisi ini, maka sebelum jatuh tempo pembayaran hutang tersebut mereka akan menabung sehingga dapat membayar kenaikan pajak tersebut.

II.4. *Flypaper Effect*

Suatu fenomena ketika suatu pemerintah daerah mendapat subsidi dana dari pemerintah pusat, subsidi itu cenderung digunakan untuk keperluan anggarannya yaitu peningkatan jasa pelayanan publik. Oleh karena itu, subsidi dari pemerintah pusat menaikkan pengeluaran pemerintah daerah dan hanya sedikit mengurangi beban pajak masyarakat.

II.5. *Revenue dan Expenditure Assignment*

Revenue assignment berbicara mengenai cara memungut pajak yang dilakukan pemerintah pusat. Dalam pengumpulan pajak diperhitungkan juga biaya pengumpulannya. Semakin banyak pajak yang dikumpulkan semakin murah biaya pengumpulannya karena dapat tercapainya skala ekonomi.

Sementara *expenditure assignment* berbicara mengenai cara mengalokasikan (*spending*) dana yang ada untuk keperluan publik. Karena yang lebih mengetahui kebutuhan publik adalah pemerintahan lokal yang bersangkutan, maka *expenditure assignment* dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. *Revenue* dan *expenditure assignment* yang dilakukan oleh institusi berbeda memberi dampak ketidaksesuaian pengeluaran dan

³ Musgrave, Richard A. 1989. *Public Finance In Theory and Practice*, 5th Ed. Singapura: McGraw-Hill. (hal. 452)

penerimaan. Dana dari pajak akan diterima oleh pemerintah pusat tetapi pemakaian dana dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ketidaksesuaian ini disebut *vertical imbalances*.

Selain itu, terdapat pula kondisi dimana pemerintah pusat menentukan standar minimal barang publik. Namun, tidak semua daerah mampu mencapai standar itu oleh karena tiap daerah mempunyai *natural endowment* yang berbeda-beda. Daerah-daerah yang tidak mampu membutuhkan bantuan dana pemerintah pusat. Ketidakseimbangan kemampuan antar daerah ini disebut *horizontal imbalances*.

II.6. Teori Lokalisasi Industri

Teori lokalisasi industri menjawab pertanyaan: industri apa saja dan masing-masing berapa banyak yang sebaiknya ada di dalam sebuah daerah supaya efisien secara ekonomi?. Sebenarnya lokasi ideal setiap industri adalah unik, berbeda satu sama lain. Faktor dasar yang mempengaruhi keputusan lokasi industri adalah akses kepada dan biaya faktor input serta akses dan biaya pengiriman ke pasar.

Dalam menentukan lokasi industri, bisa dipakai teknik *comparative cost*. *Comparative cost* menentukan di daerah mana suatu industri membutuhkan biaya produksi dan biaya pengiriman terendah. Bila dalam proses penentuan lokasi ini prospek pertumbuhan industri suatu daerah ingin dipertimbangkan, maka boleh lebih dari satu studi *comparative cost* diperhitungkan.

Contoh studi *comparative cost* adalah penemuan sumber daya baru yang melimpah di suatu daerah, atau pembaruan teknologi yang membuat deposito mineralnya dapat tereksplorasi, atau pembukaan pasar baru sebagai hasil perubahan politik, atau pembangunan pelabuhan, atau pembangunan jalur transportasi utama yang secara drastis mengurangi biaya pengiriman, atau sumber keuangan baru yang dapat menjadi tambahan modal, dan masih banyak lagi kemungkinan pembangunan lainnya.

Studi *comparative cost* untuk menilai kemungkinan lokasi suatu industri di daerah tertentu bisa dilakukan dengan menghitung perkiraan total biaya produksi suatu industri di tiap daerah. Daerah dengan biaya produksi dan biaya transportasi terendahlah yang seharusnya menjadi lokasi industri tersebut. Suatu studi *comparative cost* mempertimbangkan hanya elemen biaya produksi dan biaya transportasi. Biasanya elemen biaya produksi tidak terlalu berbeda antar daerah, sedangkan biaya transportasi yang membedakan industri antar daerah yang berbeda. Seperti namanya, teknik *comparative cost* memperbandingkan faktor-faktor relatif yang dimiliki daerah-daerah, bukan faktor-faktor absolut.⁴

Industri dapat dibagi berdasarkan perubahan beratnya dalam produksi:

1. Industri *weight loss*. Contoh industri *weight loss* adalah industri baja yang berat bahan bakunya lebih besar daripada berat barang jadi. Dalam proses produksi terjadi pengurangan berat. Jenis industri ini biasa berlokasi di dekat sumber bahan baku dengan alasan untuk mengurangi biaya pengiriman bahan baku.

⁴ Isard, Walter, et al. 1998. *Methods Of Interregional And Regional Analysis*. Brookfield: Ashgate Publishing Company.

2. Industri *weight gain*. Merupakan kebalikan dari industri *weight loss*, yaitu berat barang jadinya yang lebih besar dari berat bahan bakunya. Jenis industri ini biasa berlokasi di dekat pasar dengan alasan untuk mengurangi biaya pengiriman barang jadi ke pasar.

III. METODOLOGI

III. 1. Kerangka Pikir Konseptual

Industri di Indonesia telah berjalan sangat lama di Indonesia. Giatnya mengembangkan sektor ini terlihat pada rezim Orde Baru pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai kebijakan dan strategi dilakukan dengan harapan berkembangnya industri akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Cita-cita ini ternyata terbukti, berdasarkan laporan Bank Dunia pada salah satu publikasinya yang berjudul *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, Indonesia dikatakan sebagai salah satu *High Performing Asian Economies* (HPAEs). Pernyataan ini keluar berdasarkan kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat mencapai angka 7%. Ini merupakan suatu kondisi yang menakjubkan, contohnya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, industri manufaktur telah dapat menjadi salah satu sektor utama pertumbuhan dan pembangunan, bahkan telah sempat membawa Indonesia menjadi salah satu dari anggota *Asia's Dragon Economies*.

Namun, ketika kemudian krisis datang, prestasi tersebut tidak dapat berlangsung lama, karena yang terjadi justru sebaliknya. Industri yang sebelumnya begitu dibanggakan ternyata sangat rapuh. Tekanan krisis multi dimensi yang terjadi tidak mampu dihadapi oleh sebagian besar industri di Indonesia. Karena yang berkembang sangat pesat pada masa itu adalah industri yang berbasis impor dimana bahan baku yang digunakan dalam produksi sebagian besar diimpor. Sehingga ketika terjadi krisis dengan nilai tukar rupiah yang melemah, membuat bahan baku impor semakin mahal dan membuat industri tidak dapat bertahan. Ditambah lagi berbagai masalah yang terjadi pada sektor ekonomi dan non ekonomi dalam negeri yang membuat kestabilan dalam negeri tidak tercapai.

Jatuhnya rezim Orde Baru merupakan satu kesempatan yang dimanfaatkan berbagai pihak, salah satunya adalah adanya tuntutan dari berbagai daerah untuk memberlakukan desentralisasi. Sistem yang digunakan sebelumnya adalah sentralisasi, dimana segala keputusan pengelolaan dan pengalokasian sebagian besar didasarkan pada keputusan pemerintah pusat dan penerimaan daerah juga hanya bersumber dari pemerintah pusat karena seluruh pajak yang ada di daerah-daerah diberikan kepada pusat. Ternyata hal ini menimbulkan berbagai masalah, dimana justru banyak sekali daerah yang miskin dan tidak berkembang (maju) padahal bila dilihat dari *resource endowment*nya cukup besar. Kemudian kondisi inilah selain juga berbagai kondisi lainnya mendorong daerah-daerah untuk menuntut adanya desentralisasi.

Desentralisasi atau yang dikenal dengan Otonomi daerah telah berlangsung selama 3 tahun, secara resmi mulai berlaku pada 1 Januari 2001, yang berjalan dengan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 (tentang Pemerintah Daerah) dan UU nomor 25 tahun 1999 (tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah). Sejak berlakunya UU otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki PAD (pendapatan asli daerah), dana

perimbangan, pinjaman daerah, dan lainnya yang sah sebagai sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah harus kreatif dan aktif agar daerah tersebut memiliki PAD dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang besar. Bukan hanya itu melalui Otonomi Daerah ini diharapkan pemerintah daerah dapat mandiri dalam berbagai aspek khususnya juga perencanaan dan pelaksanaan. Tiap-tiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah.

Dalam kaitannya dengan industri, pemerintah daerah harus dapat memberikan insentif agar ada pengusaha yang mau mendirikan industrinya di daerah tersebut. Insentif tersebut dapat berupa insentif fiskal maupun non fiskal seperti sarana dan prasarana infrastruktur, birokrasi yang lebih mudah, pengurangan pajak dan lain-lain. Selain dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari industri tersebut, juga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi penduduknya, melalui berbagai lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan akibat keberadaan industri tersebut dan bahkan meningkatkan pendapatan secara nasional. Dengan kata lain pendirian industri ini memiliki *multiplier effect* bagi perekonomian negara. Artinya bila didirikan industri akan memberikan tambahan *output* yang berlipatganda, bukan hanya dari sektor yang bersangkutan secara langsung tetapi juga dari akibat pengaruh yang diberikan terhadap sektor-sektor lainnya.

Dana perimbangan yang diterima oleh tiap pemerintah daerah terdiri dari: (1). Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus.⁵ Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan dengan jumlah tertentu yang tiap daerah besarnya sama sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Tapi Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yang tidak dapat ditentukan menggunakan rumusan tertentu. Besarnya jumlah uang yang dapat diperoleh oleh suatu daerah dari berbagai sumber penerimaan tersebut akan menentukan bagaimana perkembangan daerah tersebut. Melalui dana tersebutlah pemerintah daerah dapat menjalankan berbagai program yang dimilikinya untuk membangun daerah tersebut.

Namun disamping keuntungan yang akan diperoleh tersebut juga memunculkan banyak persoalan yang muncul dan berkembang. Berlakunya desentralisasi tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya *spillover effect*. Penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan dampak eksternalitas yang menyebabkan penyediaannya menjadi tidak efisien (*under provided*). Contohnya pemerintah daerah A berencana membangun infrastruktur jalan, ternyata yang memakai jalan tersebut bukan hanya penduduk daerahnya karena daerah B yang bersebelahan dengannya juga diuntungkan padahal daerah B tidak ikut membayar pembangunan jalan tersebut. Ini menyebabkan pembangunan jalan tersebut tidak efisien. Dan jika daerah A mengenakan sejumlah pungutan bagi kendaraan yang melintasi daerahnya ini menyebabkan kerugian bagi daerah B karena tidak lagi menarik bagi investor.

Dalam salah satu bagian dari sumber penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman kepada pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri (harus melalui

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 pasal 6 ayat 1

pemerintah pusat). Dengan dana ini pemerintah daerah dapat menjalankan berbagai rencana untuk membangun daerahnya. Jika pemerintah daerah tersebut meminjam jangan lupa juga bahwa hutang tersebut harus dibayar kembali berikut bunga-bunganya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus arif dan bijaksana dalam penggunaannya. Diharapkan hutang tersebut digunakan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan di masa depan, sehingga pada masa jatuh tempo nanti pemerintah daerah tersebut dapat membayarnya. Jika hal ini tidak diperoleh maka jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan persentase pajak pada masa pembayaran nantinya, hal ini sering disebut dengan *Ricardian Equivalence*. Bagi masyarakat yang mengantisipasi hal ini mereka akan menabung lebih banyak sehingga mereka dapat membayar pajak tersebut nantinya. Hal ini mempengaruhi investasi, jika lebih banyak menabung berarti investasi yang dilakukan oleh masyarakat justru lebih sedikit.

Dari sisi pengusaha sendiri yang akan mendirikan industri di suatu daerah, berbagai pertimbangan ekonomi dan non ekonomi juga dilakukan. Salah satu bagian dalam pertimbangan ekonomi adalah mengenai biaya yang akan dikeluarkan oleh pengusaha tersebut selama industri tersebut berproduksi di daerah tersebut. Salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam pembiayaan adalah mengenai lokasi dimana industri tersebut akan berdiri. Pengusaha akan mempertimbangkan *comparative cost*, apakah akan dekat ke pasar atau dekat kepada sumber dayanya (input). Sehingga tiap-tiap pemerintah daerah dapat melihat hal ini sebagai peluang, jika perusahaan menganggap rata-rata biaya produksi *outputnya* sama maka alternatif lain yang dipertimbangkannya adalah perbandingan biaya transportasi antar satu daerah dengan yang lainnya. Daerah tersebut harusnya dapat memberikan insentif bagi pengusaha agar mereka mau mendirikan industrinya di daerah tersebut.

Disadari atau tidak, Otonomi Daerah telah membawa persaingan antara daerah. Tiap-tiap daerah harus memiliki keunggulan yang berbeda dengan daerah yang lainnya sehingga pengusaha mau berinvestasi di daerah tersebut. Dalam hal ini, investor sangat memperhatikan kinerja daerah dan juga pemerintah daerah dalam mengelola perekonomiannya. Sehingga peran agen pembangunan yang saat ini berada di tangan para pejabat dan pelaksana otonomi daerah sangat penting. Salah satu alternatif lain yang dapat dilihat untuk menarik investor adalah *comparative advantage* yang dimiliki daerah tersebut. Masing-masing daerah melihat apa yang tersedia banyak di daerahnya, apakah *capital abundant* atau *labor abundant*. Jika daerah tersebut memiliki *labor abundant* maka daerah tersebut dapat menarik investasi yang berupa *labor intensive industry*. Demikian pula daerah yang memiliki *capital abundant*. Dan diantara daerah ini sendiri dapat terjadi interaksi, terdapat perdagangan satu dengan yang lainnya, dan ini memberi keuntungan bagi kedua daerah tersebut.

Dalam mengembangkan industri itu sendiri tidak dapat terlepas dari peran antar sektor yang saling mendukung. Seperti peran sektor pertanian, pertambangan sebagai bahan baku maupun *intermediate goods* bagi sektor industri manufaktur, juga peran sektor perdagangan dalam memasarkan hasil-hasil industri manufaktur tersebut, dan juga berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu jika ingin mengembangkan industri, perlu juga dilihat keterkaitan pengembangan antarsektor. Dalam mengembangkan industri pemerintah daerah tidak bisa menutup mata terhadap pengembangan semua sektor. Sehingga dalam mengambil kebijakan untuk mendorong investasi industri ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor-sektor yang saling terkait itu.

III. 2. IRIO (*Inter Regional Input Output*)

Aspek penting dari model IRIO (*Inter Regional Input Output*) adalah kemampuannya untuk mengukur dan memodelkan saling keterkaitan ekonomi antar *region*. IRIO bagus untuk menelusuri pengaruh dari perubahan-perubahan eksogen terhadap perekonomian suatu *region*. Pada IRIO kita bisa melihat pergerakan arus barang antar sektor dan antar *region* dan mengestimasi efek pergerakan tersebut terhadap beberapa *region*. Analisa IRIO mengandung agregasi ganda, produksi tidak hanya diperinci menurut komoditas tetapi juga menurut *region*.

Output suatu *region* tidak hanya digunakan untuk sektor-sektor produksi di *region* itu sendiri tapi juga diekspor ke *region* lain, input yang digunakan oleh suatu *region* tidak hanya berasal dari *region* itu sendiri tapi juga diimpor dari *region* lain. Dengan demikian, analisa seperti ini bisa mendeskripsikan perdagangan *interregional* dan juga produksi *regional*. Pada analisa ini juga dimungkinkan untuk menangkap *interregional spillover effect* dan *interregional feedback effect*.

Penelitian ini memakai data IRIO Indonesia tahun 1995, terdiri dari 27 propinsi yang masing-masing propinsi terdiri dari 9 sektor (matriks 243x243).

$$Z = \begin{bmatrix} z^{11} & z^{12} & z^{13} & \dots \\ z^{21} & z^{22} & z^{23} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ z^{nm} & z^{nm} & \dots & z^{nm} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Dalam satu *region*, *output* setiap sektor (X_n) didistribusikan kepada pengguna antara yaitu sektor-sektor lain (Z_{nn}); dan pengguna akhir (Y_n).

$$\begin{aligned} X_1 &= z_{11} + z_{12} + \dots + z_{1n} + Y_1 \\ X_2 &= z_{21} + z_{22} + \dots + z_{2n} + Y_2 \\ X_n &= z_{n1} + z_{n2} + \dots + z_{nm} + Y_n \end{aligned} \quad (2)$$

Setelah itu, dicari matriks teknologi dengan perhitungan elemennya sebagai berikut.

$$\alpha_{11} = \frac{z_{nm}}{x_n} \quad (3)$$

$$A = \begin{bmatrix} a^{11} & a^{12} & a^{13} & \dots \\ a^{21} & a^{22} & a^{23} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a^{nm} & a^{nm} & \dots & a^{nm} \end{bmatrix} \quad (4)$$

a_{12} artinya untuk memproduksi 1 satuan uang *output* sektor 2 diperlukan input sektor 1 sebesar a_{12} satuan uang. Matriks diatas disebut matriks teknologi.

Hubungan elemen-elemen matriks teknologi dengan *output* sektor-sektor adalah sebagai berikut:

$$X_1 = a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n + Y_1$$

$$X_2 = a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n + Y_2$$

$$X_n = a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n + Y_n$$

$$X = AX + Y, \quad (I-A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} \quad (5)$$

Sehingga untuk mengetahui hubungan *output* sektor (X) dengan permintaan akhir (Y) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X &= (I-A)^{-1}Y \\ \Delta X &= (I-A)^{-1} \Delta Y \end{aligned} \quad (6)$$

Multipliernya adalah $(I-A)^{-1}$. Elemen-elemen ini membentuk matriks invers Leontief. Elemen-elemen didalamnya menunjukkan *output multiplier* yaitu besarnya perubahan output di perekonomian (ΔX) karena adanya peningkatan permintaan akhir sebesar (ΔY) Rp 1,-.

Bila matriks *output multiplier* di atas dikalikan dengan matriks proporsi upah di masing-masing sektor akan nampak nilai *household income multiplier*. *Income multiplier* ingin melihat besarnya perubahan pendapatan rumah tangga akibat peningkatan permintaan akhir sebesar Rp 1,-.

Tabel 1. Tabel IRIO

propinsi	sektor	propinsi 1			...			propinsi 27		
		1	...	9	1	...	9	1	...	9
propinsi 1	1	z_{11}^{11}	...	z_{19}^{11}	$z_{11}^{1\dots}$...	$z_{19}^{1\dots}$	z_{11}^{127}	...	z_{19}^{127}
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	9	z_{91}^{11}	...	z_{99}^{11}	$z_{91}^{1\dots}$...	$z_{99}^{1\dots}$	z_{91}^{127}	...	z_{99}^{127}
:	1	$z_{11}^{...1}$...	$z_{19}^{...1}$	$z_{11}^{...}$...	$z_{19}^{...}$	$z_{11}^{...27}$...	$z_{19}^{...27}$
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	9	$z_{91}^{...1}$...	$z_{99}^{...1}$	$z_{91}^{...}$...	$z_{99}^{...}$	$z_{91}^{...27}$...	$z_{99}^{...27}$
propinsi 27	1	z_{11}^{271}	...	z_{19}^{271}	$z_{11}^{27\dots}$...	$z_{19}^{27\dots}$	z_{11}^{2727}	...	z_{19}^{2727}
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	9	z_{91}^{271}	...	z_{99}^{271}	$z_{91}^{27\dots}$...	$z_{99}^{27\dots}$	z_{91}^{2727}	...	z_{99}^{2727}

Matriks diagonal merupakan matriks transaksi antar sektor didalam satu daerah, matriks off-diagonal merupakan transaksi sektor antar suatu daerah dengan daerah lain.

Komponen-komponen data IRIO terdiri dari:

- Horizontal (komponen *output*)
Permintaan antara (masing-masing daerah), permintaan akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah pusat dan masing-masing daerah, investasi pemerintah pusat dan daerah, investasi swasta, perubahan *stock*).
- Vertikal (komponen *input*)
Input antara masing-masing daerah, *input* primer (upah gaji, surplus usaha, penyusutan, *indirect tax*, subsidi).

Dari data IRIO ini dihitung *multiplier* (*income multiplier* dan *output multiplier*) untuk melihat pengaruh suatu sektor terhadap *region*-nya dan pengaruh suatu *region* terhadap *region* lain.

III.3 Sumber Data

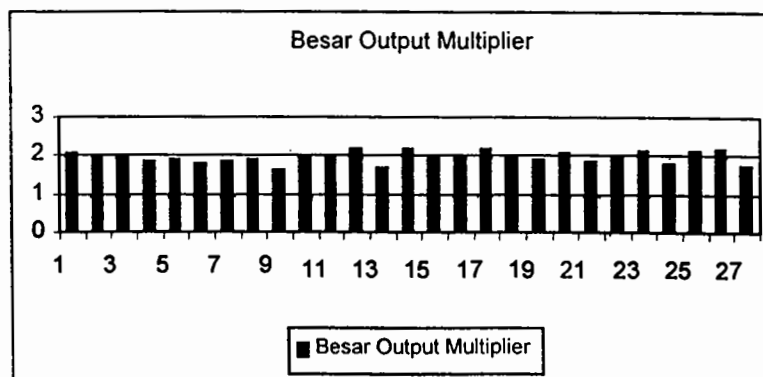
Data yang digunakan tabel *input-output* 1995 karena tabel I-O setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan (yaitu setelah 2001) belum diterbitkan Bappenas. Data terbagi atas sektor menurut ISIC (*International Standard Industrial Classification*). Data didapat dari kelas Ekonomi Regional semester genap 2003/2004. Data diolah dengan *software Python IO*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Hasil

Sebagai model kuantitatif, tabel IRIO selain memberikan gambaran tentang struktur ketergantungan sektoral (*sectoral dependency*), juga mampu menunjukkan ketergantungan daerah/regional/spasial, antara satu kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan kegiatan ekonomi lainnya di daerah lain. Sesuai dengan tujuan penulisan, analisa akan dilakukan untuk menghitung dan mengkaji besarnya *output multiplier* serta dampak adanya desentralisasi fiskal terhadap perekonomian dengan menggunakan peran pengeluaran pemerintah.

Gambar 1. Besar *Output Multiplier*



Secara garis besar *output multiplier* propinsi-propinsi di Indonesia paling besar berada di sektor bangunan, manufaktur, dan listrik gas air (LGA). Untuk sektor bangunan, *output multiplier* terbesar terdapat di propinsi Maluku. Untuk sektor manufaktur, *output multiplier* terbesar terdapat di propinsi Sumatera Utara. Untuk sektor LGA, *output multiplier* terbesar terdapat di propinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2. Tabel IRIO

No.	Propinsi	Sektor dengan <i>output multiplier</i> terbesar	Besar <i>Output Multiplier</i>
1	Aceh	Bangunan	2.0860
2	Sumatera Utara	Industri	1.9567
3	Sumatera Barat	Bangunan	1.9683
4	Riau	Bangunan	1.8729
5	Jambi	Industri	1.9275
6	Sumatera Selatan	Industri	1.8172
7	Bengkulu	Industri	1.8611
8	Lampung	Bangunan	1.9279
9	Jakarta	Listrik, Gas, dan Air	1.6287
10	Jawa Barat	Bangunan	1.9433
11	Jawa Tengah	Bangunan	2.0427
12	DIY	Bangunan	2.1590
13	Jawa Timur	Industri	1.7081
14	Bali	Bangunan	2.1642
15	Nusa Tenggara Barat	Bangunan	1.9888
16	Nusa Tenggara Timur	Listrik, Gas, dan Air	1.9462
17	Timor-Timur	Bangunan	2.1879
18	Kalimantan Barat	Industri	1.9441
19	Kalimantan Tengah	Bangunan	1.9127
20	Kalimantan Selatan	Bangunan	2.0548
21	Kalimantan Timur	Bangunan	1.8365
22	Sulawesi Utara	Bangunan	1.9502
23	Sulawesi Tengah	Bangunan	2.1305
24	Sulawesi Selatan	Bangunan	1.7922
25	Sulawesi Utara	Bangunan	2.1355
26	Maluku	Bangunan	2.2057
27	Irian Jaya	Industri	1.7622

Output multiplier terbesar dari tiap propinsi kebanyakan terdapat di sektor bangunan khususnya di kawasan timur Indonesia, dimana yang terbesar adalah Maluku. Daerah Maluku belum berkembang, pembangunan masih kurang. Belum banyak dibangun sarana prasarana. Dari sisi geografis, letaknya relatif strategis yaitu kawasan pelabuhan. Hal ini mendorong arus migrasi penduduk masuk ke Maluku. Selain itu, hasil bumi dari Maluku seperti lada, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya merupakan komoditas ekspor unggulan. Kedua hal ini merupakan faktor *abundant* yang dimiliki Maluku. Untuk dapat mengembangkan potensi ini dibutuhkan banyak infrastruktur dan sarana-prasarana. Inilah yang menyebabkan *output multiplier* terbesar terdapat di sektor bangunan Maluku.

Selain sektor bangunan, propinsi-propinsi Indonesia juga berpotensi di sektor manufaktur dan yang paling berpotensi adalah di Sumatera Utara (ditunjukkan oleh nilai *output multiplier*nya terbesar). Sumatera Utara sangat berpotensi karena kaya akan natural resource dan human resource. Daerahnya dekat dengan bahan tambang dan perkebunan. Sejak dulu daerah Sumatera Utara memang daerah yang paling berkembang di pulau Sumatera. Terlihat dari banyaknya perkebunan dan pabrik teh, demikian juga tembakau Deli yang merupakan tembakau berkualitas tinggi di dunia. Di samping itu, populasinya yang besar merupakan sumber input dan pasar bagi industri. Inilah yang menjadi faktor

abundant propinsi ini. Selain itu, secara historis Medan sejak dulu merupakan pusat administratif pemerintahan; tentunya hal ini memberi dampak sangat baik bagi Sumatera Utara. Pengembangan sektor manufaktur menghasilkan *output multiplier* yang besar karena bisa menyerap semua potensi tersebut.

Tabel 3. Data *Income Multiplier* Tiap Propinsi

No.	Propinsi	Sektor dengan <i>output multiplier</i> terbesar	Besar <i>income Multiplier</i>
1	Aceh	Bangunan	0.99636
2	Sumatera Utara	Industri	0.98554
3	Sumatera Barat	Bangunan	0.99329
4	Riau	Bangunan	0.978
5	Jambi	Industri	0.99212
6	Sumatera Selatan	Industri	0.98273
7	Bengkulu	Indutri	0.99149
8	Lampung	Bangunan	0.98576
9	Jakarta	Listrik, Gas, dan Air	0.93802
10	Jawa Barat	Bangunan	0.98106
11	Jawa Tengah	Bangunan	0.96933
12	DIY	Bangunan	0.99077
13	Jawa Timur	Industri	0.96116
14	Bali	Bangunan	0.98353
15	Nusa Tenggara Barat	Bangunan	0.99429
16	Nusa Tenggara Timur	Listrik, Gas, dan Air	0.9975
17	Timor-Timur	Bangunan	0.99764
18	Kalimantan Barat	Industri	0.99088
19	Kalimantan Tengah	Bangunan	0.99271
20	Kalimantan Selatan	Bangunan	0.9838
21	Kalimantan Timur	Bangunan	0.98639
22	Sulawesi Utara	Bangunan	0.99264
23	Sulawesi Tengah	Bangunan	0.99474
24	Sulawesi Selatan	Bangunan	0.98913
25	Sulawesi Utara	Bangunan	0.99693
26	Maluku	Bangunan	0.99352
27	Irian Jaya	Industri	0.90775

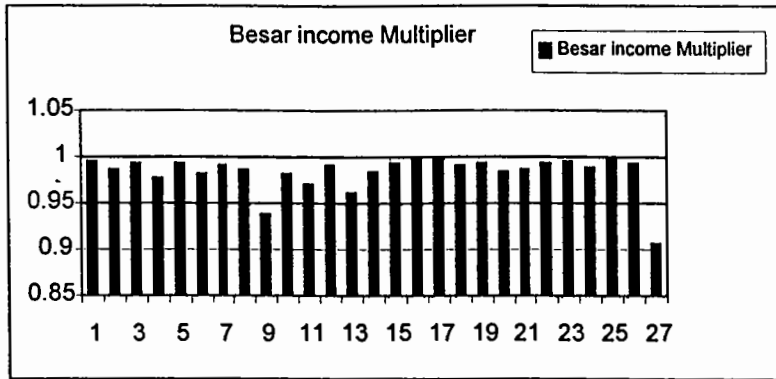
Selain bangunan dan manufaktur, industri yang juga berpotensi untuk dikembangkan adalah listrik, gas, dan air (LGA) terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi alam NTT yang kering seperti curah hujan sangat rendah, terdapat banyak daerah sabana, dan tanah yang gersang membuat air menjadi barang yang langka. Diprediksikan pengembangan LGA akan memberikan efek *multiplier* yang sangat besar karena propinsi ini masih sangat belum berkembang. Sesuai dengan kondisi alamnya, pengembangan sektor LGA bisa dilakukan misalnya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

Memperhatikan nilai *output* dan *income multiplier*, ternyata propinsi yang memiliki *output multiplier* besar juga memiliki *income multiplier* besar. Dilihat dari grafik di atas, nilai *multiplier* besar cenderung dimiliki kawasan timur Indonesia seperti NTT, Sulawesi Utara, Maluku, dan lain-lain. Ini artinya daerah-daerah tersebut belum berkembang padahal mempunyai potensi yang besar sekalipun dibutuhkan usaha yang besar dan mahal pula untuk mengembangkannya.

Beberapa daerah juga mempunyai nilai *multiplier* besar dan sumber alam yang relatif lebih mudah digali namun potensi ini belum dikembangkan pula seperti Aceh, Sumatera

Barat, Jambi, dan Bengkulu. Contohnya potensi industri tambang dan kehutanan seperti minyak dan gas alam Aceh.

Gambar 2. Besar Income Multiplier



Di samping itu, ada juga daerah-daerah yang sudah cukup maju seperti DI Yogyakarta dan Bali tetapi memiliki nilai *multiplier* yang juga besar. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut belum dikembangkan secara maksimal. Sebagai contoh, daerah gunung Kidul yang merupakan daerah termiskin di Yogyakarta padahal sebenarnya memiliki potensi yang besar seperti pertanian lahan kering, padi gogo, dan tanaman jamur.

Dilihat dari hasil pengolahan data, ternyata nilai *multiplier* terkecil justru di DKI Jakarta. Ini karena Jakarta merupakan daerah yang sudah sangat berkembang. Sudah tidak ada lagi lahan kosong sehingga pengembangannya tidak memberi dampak yang cukup besar. Misalnya dalam industri konstruksi, *supply* pembangunan terlalu banyak menimbulkan fenomena-fenomena seperti rendahnya tingkat hunian gedung perkantoran dan apartemen. Nilai *multiplier* terbesar di Jakarta adalah LGA, itupun tergolong relatif kecil dibanding dengan *multiplier* daerah-daerah lain. Nilai *multiplier* LGA yang besar inipun merupakan efek yang dibawa oleh berlebihan pembangunan di Jakarta.

Semua sektor-sektor unggulan (yang mempunyai nilai *multiplier* besar) di tiap propinsi bila dikembangkan tidak hanya memberi dampak positif bagi propinsinya tetapi juga bagi propinsi-propinsi lainnya yang pada akhirnya menunjang pembangunan industri secara nasional. Hal ini mungkin terjadi karena besarnya ketergantungan antar propinsi yang ditunjukkan oleh adanya nilai efek tidak langsung yang terdapat pada matriks invers Leontief.

IV.2. Prospek Pengembangan Industri Pada Era Otonomi Daerah

Setelah melakukan analisa, terlihat sektor-sektor di propinsi-propinsi yang memiliki *multiplier* besar yang artinya sektor-sektor tersebut akan memberikan pengaruh yang bagus untuk pengembangan industri propinsi maupun nasional.

Sebaiknya pemerintah mengutamakan pengembangan sektor-sektor tersebut terlebih dahulu. Dalam sistem otonomi daerah, hal ini menjadi tugas utama pemerintah daerah (pemda). Pengembangan sektor-sektor tersebut membutuhkan investasi yang tentu saja sangat besar. Agar bisa menarik investor, daerah harus menyediakan infrastruktur yang

mendukung. Selama ini sebagian besar dana pembangunan infrastruktur berasal dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum (DAU), bukan pendapatan asli daerah (PAD). Dari data APBD seluruh propinsi 2002, rata-rata PAD hanya 10,61% dari total penerimaan daerah, sementara DAU mencapai 65,32%.

Seharusnya pemda menggunakan DAU tersebut secara optimal agar pemakaiannya efektif. Dengan sarana infrastruktur yang bagus, hal ini akan menjadi insentif bagi investor untuk masuk dan mengembangkan industri unggulan tersebut. Dengan semakin berkembangnya industri, pendapatan pemda dengan sendirinya akan meningkat. Industri-industri tersebut akan memberi masukan berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.

Semakin besarnya sumber daya alam yang tergali, pembangunan industri, dan penyerapan tenaga kerja lokal akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas daerah yang semakin besar mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam bentuk DAU yang semakin kecil. DAU adalah selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah, selengkapnya bisa dilihat diperhitungan DAU (lihat lampiran 2). Ini akan mendorong kemandirian daerah otonom.

Daerah juga melakukan pinjaman untuk membiayai pembangunannya. Pemda harus memiliki manajemen yang bagus agar dapat mengelola pinjaman tersebut dengan efektif. Jika pinjaman dikelola dengan baik, pinjaman dapat dikembalikan sesuai waktu jatuh tempo bahkan menghasilkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan daerah sehingga tidak perlu membebankan masyarakat dengan peningkatan pajak.

Dari waktu ke waktu pinjaman ini harus semakin berkurang sebab inti otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah pusat perlu ikut mendorong hal ini, bisa dengan cara mendeaerahkan objek-objek pajak yang selama ini dikumpulkan oleh pemerintah pusat, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)⁶.

Cara perlakuan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tidaklah bisa disamakan sebab setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh selama ini pembebasan PPN untuk daerah-daerah tidak memperhitungkan perbedaan yang nyata antara kondisi daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, daerah yang lebih terbuka seperti Manado dan Bitung diberikan fasilitas yang sama dengan daerah yang tertutup seperti Biak. Implikasinya adalah investor cenderung lebih memilih Manado dan Bitung, sehingga arus investasi ke daerah tertutup seperti Biak semakin kecil.

Tidak menutup kemungkinan, otonomi daerah akan menciptakan atmosfer persaingan antar daerah sehingga masing-masing pemda terus mengembangkan daerahnya sampai memberi eksternalitas negatif bagi daerah lain. Untuk mengatasi hal ini, pada kasus tertentu perlu dilakukan kerjasama antar daerah untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut, seperti pembangunan kawasan industri terpadu.

Inti dari otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah dalam rangka menggali potensi tiap-tiap daerah yang berbeda-beda. Pada awalnya peran pemerintah pusat sangat

6 Dartanto, Teguh. *Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Intergovernmental Transfer di Era Otonomi Daerah*, Depok : Workshop Regional Finance, 2003. hal 2.

dibutuhkan untuk mendukung pengembangan industri di daerah, dimana dengan berkembangnya industri akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

- Daerah-daerah dengan nilai *output* dan *income multiplier* besar berpotensi untuk berkembang.
- Daerah-daerah tersebut adalah daerah yang relatif tidak maju, seperti kebanyakan propinsi kawasan timur Indonesia.
- Tetapi ada juga daerah-daerah yang relatif sudah maju namun mempunyai efek *multiplier* yang besar, seperti Yogyakarta dan Bali. Hal ini dikarenakan masih banyak potensi daerah tersebut yang belum tergali.
- Dari semua propinsi, yang *multiplier*nya paling kecil adalah DKI Jakarta. Ini karena sebagai ibukota sekaligus pusat perekonomian Jakarta sudah sangat berkembang.
- Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah mengutamakan pengembangan sektor-sektor yang memiliki *multiplier* yang besar.
- Pemerintah daerah harus mengelola dana tersedia dengan efektif untuk pengembangan infrastruktur agar menarik investor untuk mengembangkan industri di sektor-sektor yang memiliki *multiplier* besar.
- Pemerintah pusat harus memperhatikan tiap-tiap daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing (tidak selalu menetapkan peraturan yang seragam untuk seluruh daerah).
- Kebijakan otonomi daerah pada akhirnya harus dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan daerah-daerah di Indonesia.

VI. KETERBATASAN STUDI

Data I-O sulit untuk didapat, walaupun bisa dengan survey yang sangat mahal. Asumsi dalam data *input-output* adalah industri dianggap memproduksi hanya pada satu jenis barang saja, fungsi *input*-nya linier, perubahan modal kapasitas produksi tidak diperhitungkan, faktor harga sama sekali tidak diperhitungkan. Akan tetapi bila dibandingkan dengan analisa lain, analisa IRIO merupakan analisa yang relatif lebih dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dartanto, Teguh.** "Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Intergovernmental Transfer di Era Otonomi Daerah." *Workshop Regional Finance* Depok., 2003.
- Isard, Walter, et al.** *Methods Of Interregional And Regional Analysis*. Brookfield: Ashgate Publishing Company, 1998.
- Krugman, R. Paul.** *International Economics*, 5th Edition, Massachussets: Addison-Wesley Publishing Company, 2000.
- Musgrave, Richard A.** *Public Finance In Theory and Practice*, 5th eds., Singapura: McGraw-Hill, 1989.

- Nazara, Suahasil.** "Catatan matakuliah Ekonomi Regional semester genap 2003/2004", Unpublished.
- Nazara, Suahasil.** *Analisa Input Output*. Jakarta: LP-FEUI, 1995.
- Nurcholis, Bambang PSB.** "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Antar Daerah: Analisa Model IRIO." *Indonesian Journal Of Economics and Development*, Vol.3, No.2, 2003.
- O' Sullivan, Arthur.** *Urban Economics, 5th edition*. New York: Mc-GrawHill, 2003.
- Richardson, Harry.** *Dasar-dasar Ekonomi Regional*. Jakarta: LP-FEUI, 2000.
- _____. "Tugas Kelompok 2 matakuliah Ekonomi Regional semester genap 2003/2004." Unpublished.
- UU Otonomi Daerah**, 1999.